

HUKUM PAJAK DI INDONESIA

Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan
di Bidang Perpajakan

M. Farouq S., A.Md., S.E., S.H., S.HI., Bkp.

		PERPUSTAKAAN	
No. INV.	064/mht/19/C-1		
Th. Angg.	2019	Cat C-1	
PARAP	<i>Far</i>	TGL 17/07/2019	



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

- Dosen Fakultas Ekonomi-Akuntansi di Universitas Persada Indonesia (UPI Y AI), Jakarta Partner pada KAP dan Konsultan Pajak Profesional v
- CFO CAS GROUP vii
- Ketua IKPI Jakarta Selatan Founder & Managing Partner pada Kantor KAP dan Konsultan Pajak ix

PENGANTAR PENULIS xi

DAFTAR ISI xv

BAB 1 SEJARAH MODIFIKASI DAN REFORMASI HUKUM

PAJAK 1

- A. Sejarah Perkembangan Hukum Pajak Indonesia 6
 - 1. Masa Penjajahan Belanda 11
 - a. Ordonansi Pajak Pertanahan 14
 - b. Ordonansi Pajak Pendapatan 17
 - c. Ordonansi Pajak Perseroan 19
 - d. Ordonansi Pajak Lainnya 21
 - 2. Masa Penjajahan Jepang 22
 - 3. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia 24
 - a. UU Pajak Hasil Bumi 25
 - b. UU Pajak Dividen 26
 - c. UU Tata Cara Pemungutan Pajak (MPS-MPO) 27
 - d. Perubahan UU Pajak Pendapatan 28
 - e. Perubahan UU Pajak Perseroan 28
 - f. UU Pajak Peredaran/Penjualan 29

g. Perubahan UU Pajak Lainnya	31
B. Masa Modifikasi Hukum Pajak Nasional	33
1. UU KUP	37
2. UU PPh	38
3. UU PPn dan PPnBM	39
4. UU PBB	40
5. UU BM	42
C. Masa Reformasi Hukum Pajak Nasional	42
1. Tahapan Reformasi Hukum Pajak	42
a. Tahap Pertama, Tahun 1983-1985	43
b. Tahap Kedua, Tahun 1994	43
c. Tahap Ketiga, Tahun 1997	44
d. Tahap Keempat, Tahun 2000	44
e. Tahap Kelima, Tahun 2007-2009	44
2. Perubahan Hukum Pajak Materiel	45
a. UU PPh dan Perubahannya	45
b. UU PPn dan Perubahannya	49
c. UU PBB dan Perubahannya	55
d. UU Bea Meterai	57
e. UU BPHTB dan Perubahannya	58
f. UU Kepabeanan dan Perubahannya	58
g. UU Cukai dan Perubahannya	62
h. UU PDRD dan Penggantiannya	64
3. Perubahan Hukum Pajak Formil	67
a. UU KUP dan Perubahannya	67
b. UU PPSP dan Perubahannya	70
c. UU BPSP dan Penggantiannya	75
d. UU PP	77
4. Desentralisasi Objek Pemungutan Pajak	83
a. Desentralisasi Objek PPn Tertentu	83
b. Desentralisasi PBB dan BPHTB	84
c. Diferensiasi Pajak Daerah	85
D. Modernisasi Administrasi dan Institusi Perpajakan	86
1. Modernisasi Manajemen Perpajakan	89
a. Struktur Organisasi	89
b. <i>Business Process</i>	90
c. Manajemen SDM	91
d. Penerapan <i>Good Governance</i>	93
2. Reposisi Institusi Perpajakan	94



a. Kantor Pusat DJP.....	96
b. Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP).....	98
c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	102
1) KPP Wajib Pajak Besar (LTO).....	103
2) KPP Madya (MTO).....	104
3) KPP Pratama (STO)	106
d. KP2KP.....	110
e. Institusi Pajak Daerah	112
3. Optimalisasi Pengawasan Perpajakan	115
a. Pengawasan Internal.....	115
b. Pengawasan Eksternal	117
 BAB 2 URGENSI PAJAK, EKSISTENSI, DAN FUNGSI HUKUM PAJAK	 119
A. Pajak dan Hak Penerimaan Negara.....	120
1. Sumber-sumber Pendapatan/Penerimaan Negara	120
a. Penerimaan Pajak dan Retribusi.....	123
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	126
2. Urgensi Pajak Bagi Negara	127
a. Pajak dalam APBN	128
b. Rasio Penerimaan Pajak	134
c. Pajak dan Kemandirian Ekonomi Bangsa	138
3. Fungsi Pajak.....	139
a. Fungsi <i>Budgeter</i>	139
b. Fungsi <i>Reguler</i>	139
c. Fungsi Lainnya	142
4. Jenis dan Sistem Pemungutan Pajak.....	149
a. Jenis-jenis Pemungutan Pajak.....	149
1) Pajak Langsung dan Tidak Langsung	150
2) Pajak Subjektif dan Objektif	150
3) Pajak Pemerintah Pusat dan Pajak Pemerintah Daerah.....	151
b. Sistem Pemungutan Pajak.....	157
1) <i>Self Assesment System</i>	157
2) <i>Witholding Tax System</i>	159
3) <i>Official Assesment System</i>	162
5. Hambatan dalam Pemungutan Pajak.....	163
a. Perlawanan Pasif.....	164
b. Perlawanan Aktif.....	164
6. Langkah Antisipasi dan Minimalisasi Penghindaran Pajak.....	171



a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).....	172
b. Penetapan Domisili Fiskal atas Perusahaan <i>Offshore</i> di Negara <i>Tax Heaven</i>	175
c. Kesepakatan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA)	179
d. Dokumentasi dan Pelaporan <i>Transfer Pricing</i> (TP Doc).....	182
7. Pajak Terutang dan Utang Pajak.....	186
a. Pengertian dan Perbedaanannya.....	187
1) Ajaran Materiil	187
2) Ajaran Formil	189
b. Unsur-unsur Perhitungan Utang Pajak	193
1) Saat Terutang Pajak.....	194
2) Dasar Pengenaan Pajak	196
3) Tarif dan Perhitungan Pajak Terutang/Utang Pajak.....	200
c. Timbulnya Utang Pajak.....	207
1) Surat Ketetapan Pajak.....	209
2) Surat Keputusan Pajak.....	209
3) Surat Tagihan Pajak.....	209
4) Putusan Pajak	210
d. Sifat dan Kedudukan Utang Pajak.....	210
1) Sifat Memaksa	210
2) Hak Preferen Negara.....	212
e. Hapusnya Utang Pajak.....	213
1) Pembayaran	213
2) Kompensasi	215
3) Daluwarsa	215
4) Pembebasan	216
5) Penghapusan/Pembatalan	219
B. Pengertian, Kedudukan dan Karakteristik Hukum Pajak	223
1. Pajak dan Hukum Pajak.....	229
a. Pengertian Pajak	230
b. Pajak sebagai Kewajiban Hukum	233
2. Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak	238
a. Pengertian Hukum Pajak	238
b. Kedudukan Hukum Pajak.....	245
1) Sebagai Cabang HAN/TUN.....	249
2) Sebagai Spesialisasi Ilmu Hukum Pajak	251
3. Tugas, Tujuan dan Fungsi Hukum Pajak.....	266
a. Tugas Hukum Pajak	266
b. Tujuan Hukum Pajak	268



c. Fungsi Hukum Pajak	269
4. Sistematika Hukum Pajak;.....	269
a. Subjek Hukum di Bidang Perpajakan	270
1) Negara/Pemerintah/Fiskus.....	270
2) Masyarakat Wajib Pajak	271
3) Subjek Hukum Perantara.....	273
b. Objek Kajian Hukum Perpajakan	274
1) Hak dan Kewenangan Negara di Bidang Perpajakan	275
2) Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan.....	278
3) Pengawasan Hukum di Bidang Perpajakan	282
4) Pertanggungjawaban Hukum di Bidang Perpajakan.....	284
5) Penegakan Hukum Pajak	288
6) Penyelesaian Masalah/Sengketa Perpajakan.....	292
c. Hubungan Antara Fiskus dan Wajib Pajak.....	298
1) Hubungan Administratif	298
2) Hubungan Hukum.....	301
d. Sumber dan Hierarki Hukum Pajak.....	306
1) Sumber-sumber Hukum Pajak.....	307
2) Hierarki Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.....	309
e. Produk-produk Hukum di Bidang Perpajakan.....	315
1) Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.....	318
2) Peraturan Kebijakan Perpajakan.....	321
3) Surat Ketetapan dan Keputusan Pajak	322
4) Putusan Pajak	330
f. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pajak	334
1) Domestik	335
2) Internasional	336
g. Profesional di Bidang Administrasi dan Hukum Pajak	338
1) Praktisi/Profesional di Bidang Administrasi Perpajakan.....	339
2) Profesional di Bidang Hukum Perpajakan.....	343
5. Karakteristik Hukum Pajak	353
a. Sebagai Sistem Hukum yang Bersifat Terbuka	354
b. Sebagai Subsistem dari Kesatuan Sistem Tata Hukum Nasional ..	355
c. Sebagai Sistem Hukum yang Bersifat <i>Cross Border Law</i>	359
d. Sebagai Sarana hukum yang Berlapis dan Kondisional	362
e. Sebagai Kompilasi Keahlian Multidisipliner.....	365
f. Sebagai Sistem Hukum yang Bersifat Dinamis dan Progresif di Bidang Perpajakan.....	369
g. Sebagai Pedoman Hukum dan Administrasi yang Komprehensif	372

C. Korelasi dan Klasifikasi Hukum Pajak.....	374
1. Korelasi Hukum Pajak dengan Ilmu Hukum Lainnya	374
a. Korelasi Hukum Pajak dengan Hukum Perdata.....	375
b. Korelasi Hukum Pajak dengan Hukum Tata Negara	377
c. Korelasi Hukum Pajak dengan Hukum TUN/HAN	379
d. Korelasi Hukum Pajak dengan Hukum Pidana	382
e. Korelasi Hukum Pajak dengan Hukum Internasional.....	385
2. Klasifikasi dan Aspek Hukum di Bidang Perpajakan.....	385
a. Hukum Pajak Materiel dan Formil	386
1) Hukum Pajak Materiel.....	386
2) Hukum Pajak Formil.....	388
b. Hukum Pajak Administrasi dan Pidana	394
1) Aspek Hukum Administrasi Perpajakan.....	392
2) Aspek Hukum Pidana Perpajakan.....	393
c. Hukum Pajak Nasional dan Internasional	394
1) Hukum Pajak Nasional	394
2) Aspek Hukum Pajak Internasional	395
d. Hukum Pajak Pusat dan Daerah	396
DAFTAR PUSTAKA	399
TENTANG PENULIS	407